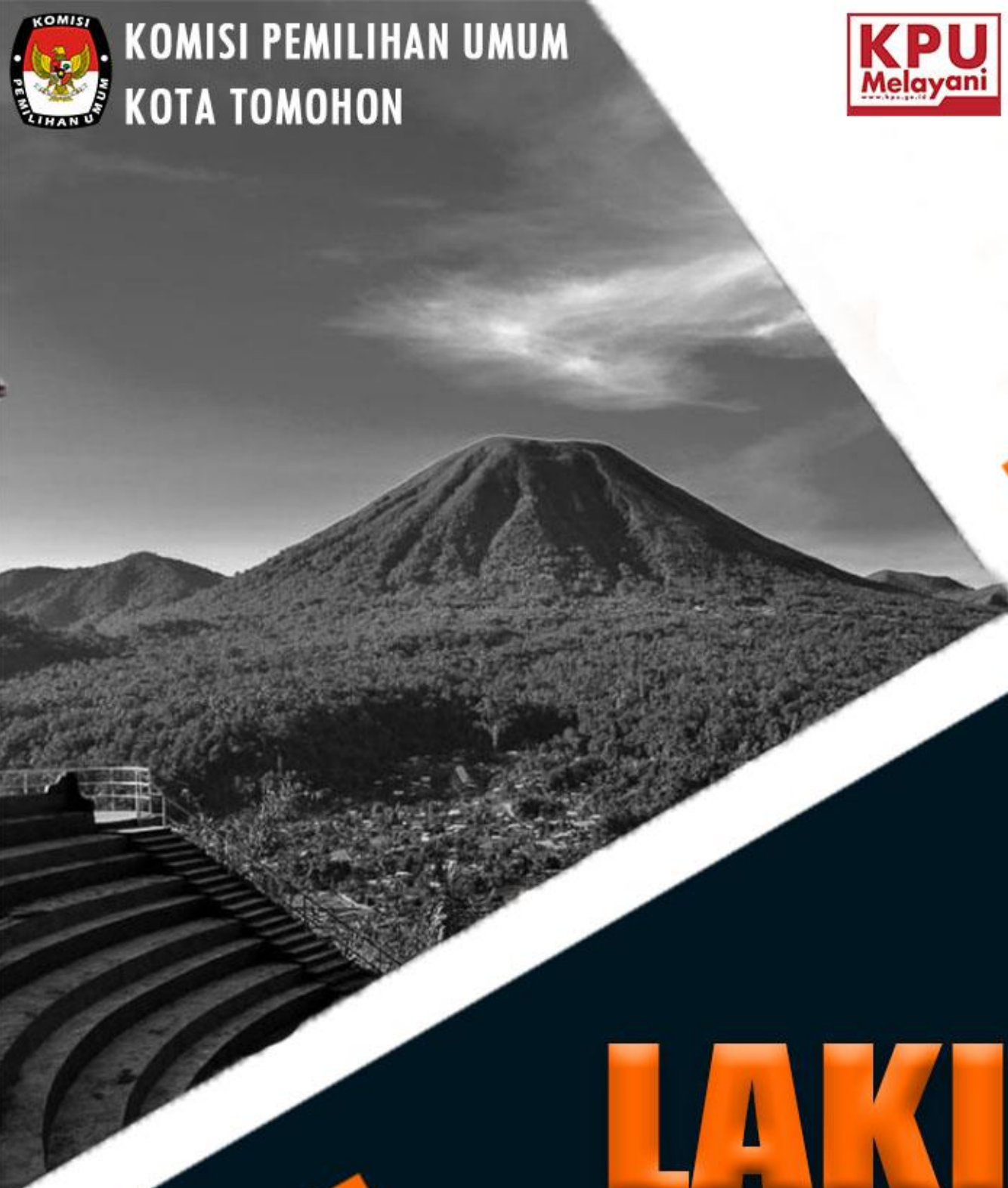




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON**



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



# **LAKIP 2021**





## DAFTAR ISI

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                | i   |
| DAFTAR GAMBAR.....                              | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                              | iii |
| PENGANTAR .....                                 | iv  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                        | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                         | 1   |
| A. Latar Belakang.....                          | 1   |
| B. Organisasi dan Tata Kerja .....              | 3   |
| C. Permasalahan .....                           | 7   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                | 8   |
| A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum..... | 9   |
| B. Perjanjian Kinerja .....                     | 9   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....             | 13  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....             | 13  |
| B. Realisasi Anggaran .....                     | 16  |
| BAB IV PENUTUP.....                             | 24  |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon .....</i> | <i>4</i> |
| <i>Gambar 2. Grafik Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....</i>            | <i>6</i> |
| <i>Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin .....</i>                 | <i>7</i> |



## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 1. Data Pegawai KPU Kota Tomohon .....</i>                              | <i>5</i>  |
| <i>Tabel 2. Keadaan PNS KPU Kota Tomohon.....</i>                                | <i>6</i>  |
| <i>Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....</i>                 | <i>6</i>  |
| <i>Tabel 4. Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin .....</i>                      | <i>7</i>  |
| <i>Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat KPU Kota Tomohon .....</i> | <i>11</i> |
| <i>Tabel 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2021.....</i>     | <i>14</i> |
| <i>Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2021.....</i>  | <i>18</i> |
| <i>Tabel 8. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2020.....</i>  | <i>21</i> |

## PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Tomohon sebagai satu-satunya instansi Lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Kota. Pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). KPU Kota Tomohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah potret gambaran progress capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik (feedback) guna perbaikan kinerja Lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2021 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan kInerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2021 KPU Kota Tomohon dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
KETUA**

**HARRYANTO Y. S. LASUT**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2021. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan di periode yang akan datang.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

*Program dan Kegiatan Tahun 2021, meliputi:*

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
  - a. Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan (3356)
    - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)
    - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)
    - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)
  - b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
    - Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)
    - Data dan Informasi Publik (3363.BMA)
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)
    - Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (3364.BAA)
    - Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)
    - Data dan Informasi Publik (3364.BMA)
    - Layanan Monitoring dan evaluasi Internal (3364.EAL)
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
  - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
    - Layanan Perkantoran (3355.EAA)
    - Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)

- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)
- b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
  - Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)
  - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)
  - Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)
- c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta dukungan sarana dan prasarana (3360)
  - Layanan Perkantoran (3360.EAA)
  - Layanan Sarana Internal (3360.EAD)
- d. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
  - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)

Sesuai hasil analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2021** dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 5.597.127.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp5.542.066.545,-** dengan prosentase **99.02%**, sedangkan di tahun **Tahun Anggaran 2020** dengan 6 (Enam) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp.18.751.739.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 16.790.519.059,-** dengan prosentase **89.54%**, Tahun Anggaran 2021 Realisasi Anggarannya lebih tinggi dari tahun anggaran 2020. Terdapat 19 indikator kegiatan yang capaiannya > 96 % yang berkategori Sangat Baik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

**K**omisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kota Tomohon sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kota Tomohon berkewajiban untuk melaksanakan Pelaporan Kinerja atas anggaran yang digunakan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021 menyajikan pencapaian kinerja KPU Kota Tomohon selama Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 dalam penyusunannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **1. Tugas dan Fungsi**

### **a. Tugas**

Sekretaris KPU Kota Tomohon secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Secara fungsional bertanggung Jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon. Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **b. Fungsi**

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Seorang Sekretariat KPU Kabupateb/Kota. Adapun Fungsi Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon;
- g. Membantu Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **B. Organisasi dan Tata Kerja**

### **1. Struktur Organisasi**

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tatalaksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

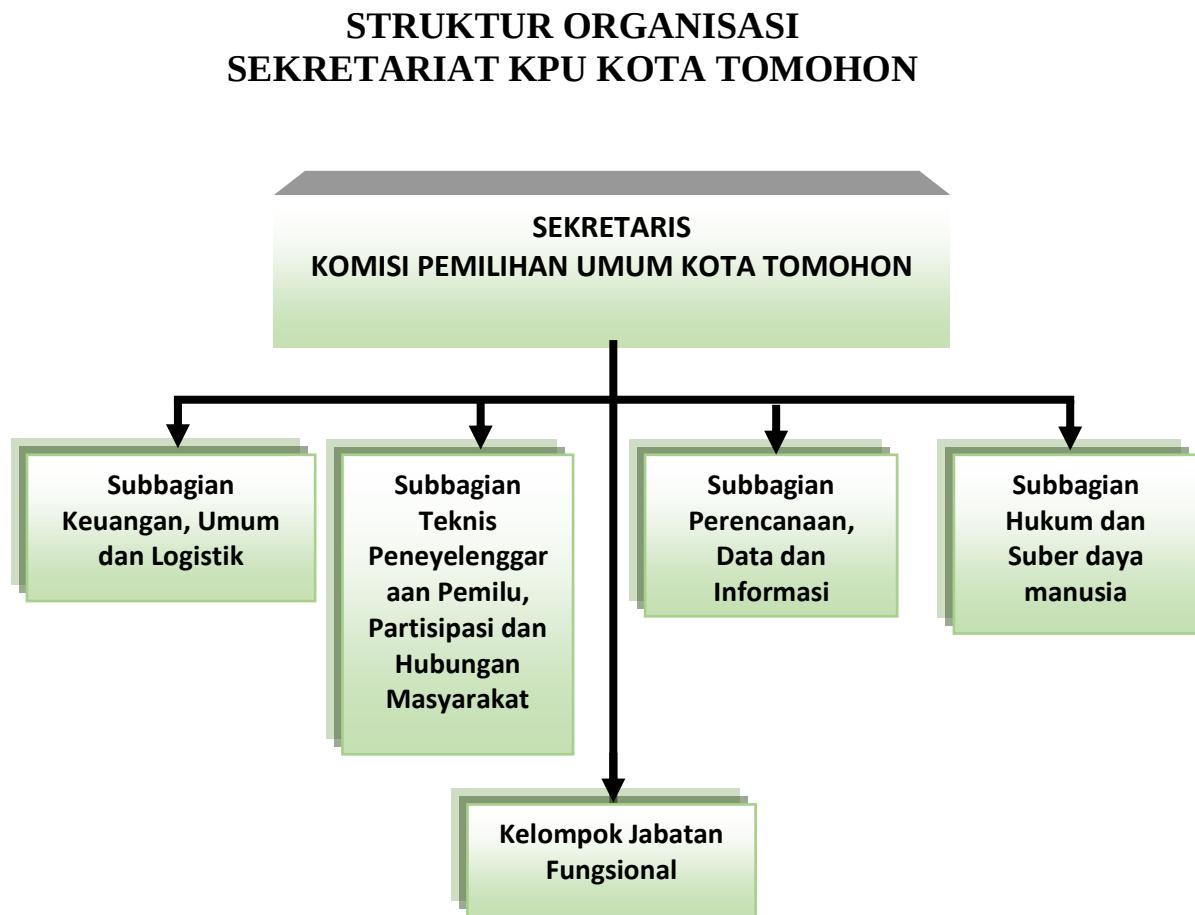
Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepiluan, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Suber daya manusia
- e. Kelompok JF.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Tomohon dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon**  
*Sumber: Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020*

## **2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan**

Tata kerja atau ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kota Tomohon serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

### 3. Keadaan Pegawai

Berdasarkan data Kepegawaian pada KPU Kota Tomohon 31 Desember 2021, terdapat 20 Orang terdiri sebagai berikut:

- PNS Sebanyak 12 Orang
- PPNP 8 orang

*Tabel 1. Data Pegawai KPU Kota Tomohon*

| KABUPATEN DAN KOTA | PNS KPU | PPNP | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------|
| 1                  | 3       | 4    | 5     |
| KPU KOTA TOMOHON   | 12      | 8    | 20    |

Keadaan PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:

*Tabel 2. Keadaan PNS KPU Kota Tomohon*

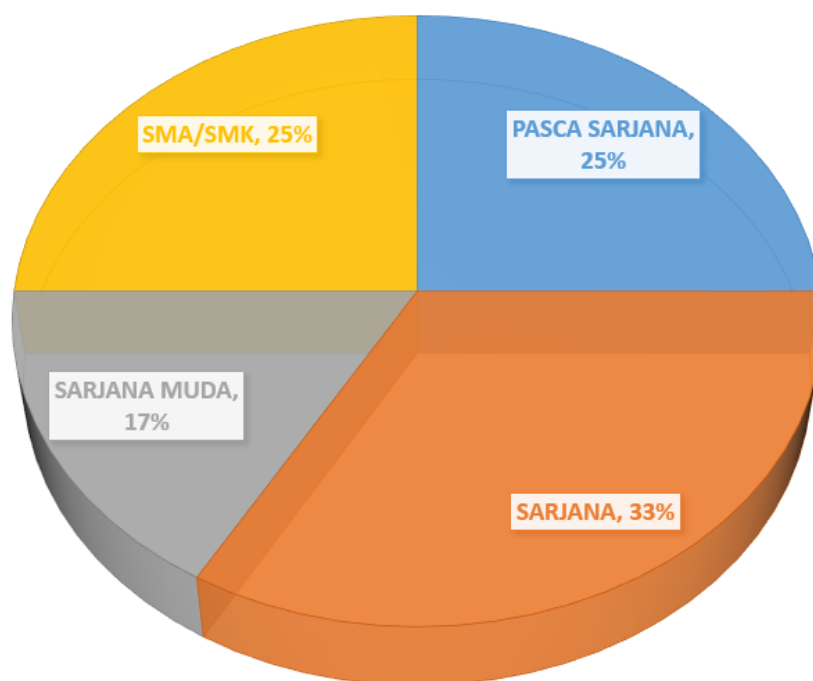
| JABATAN STRUKTURAL | ESELON | JUMLAH  |      |
|--------------------|--------|---------|------|
|                    |        | FORMASI | RILL |
| 1                  | 2      | 3       | 4    |
| SEKRETARIS         | III a  | 1       | 1    |
| KEPALA SUB BAGIAN  | IV a   | 4       | 3    |
| FUNGSIONAL UMUM    |        | 12      | 8    |

Keadaan PNS berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

*Tabel 3. Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

| NO | PENDIDIKAN    | JUMLAH | %   |
|----|---------------|--------|-----|
| 1  | 2             | 3      | 4   |
| 1  | PASCA SARJANA | 2      | 25% |
| 2  | SARJANA       | 4      | 33% |
| 3  | SARJANA MUDA  | 3      | 17% |
| 4  | SMA/SMK       | 3      | 25% |

### BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

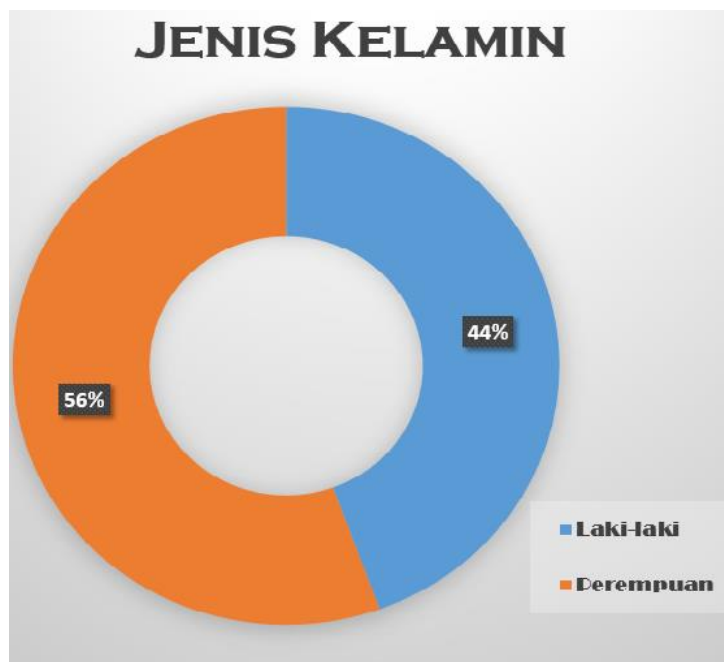


*Gambar 2. Grafik Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

*Tabel 4. Keadaan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin*

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1  | 2             | 3      |
| 1  | LAKI-LAKI     | 4      |
| 2  | PEREMPUAN     | 8      |



*Gambar 3. Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin*

### C. Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Adapun Masalah KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2021 yaitu:

- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi .
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menetapkan misi “Pengelolaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, efektif, dan Terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Tomohon adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **A. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### **B. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659030/2021 tanggal 23 November 2020, Pelaksanaan anggaran KPU Kota Tomohon mencakup 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan, 18 (delapan belas) keluaran/output dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
  - a. Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan (3356)
    - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)
    - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)
    - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)
  - b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
    - Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)

- Data dan Informasi Publik (3363.BMA)
- c. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)
  - Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (3364.BAA)
  - Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)
  - Data dan Informasi Publik (3364.BMA)
  - Layanan Monitoring dan evaluasi Internal (3364.EAL)
- 2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
  - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
    - Layanan Perkantoran (3355.EAA)
    - Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)
    - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)
  - b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
    - Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)
    - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)
    - Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)
  - c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta dukungan sarana dan prasarana (3360)
    - Layanan Perkantoran (3360.EAA)
    - Layanan Sarana Internal (3360.EAD)
  - d. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
    - Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)

*Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat KPU Kota Tomohon*

| No  | Sasaran Strategis                                                                                                                                      | Indikator kinerja                                                                                                                  | Target    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                | (4)       |
| 1   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU (3355)                                                                | Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik                      | 100%      |
| 2   | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                                                                             | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid | 95%       |
| 3   | Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan                                                                                                  | Jumlah Laporan Sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan                                                                             | 2 Laporan |
| 4   | Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan (3356) | Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan Pemilihan tanpa ada permasalahan dalam pendistribusian logistik                  | 100%      |
|     |                                                                                                                                                        | Persentase KPU Kota Tomohon dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan pengelolaan logistik pemilihan                                | 100%      |
|     |                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi                                                 | 1 Laporan |
| 5   | Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan (3357)                                                                                                   | Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data pemilih tepat waktu                                                                 | 100%      |
| 6   | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien                                                                | Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja                                                                | 90%       |
|     |                                                                                                                                                        | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                                          | 75%       |
| 7   | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Tomohon yang efektif dan efisien                                                                       | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                          | 8 kali    |
| 8   | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon                                                          | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                          | 100%      |
|     |                                                                                                                                                        | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                        | 100%      |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                        | Persentasi Gedung dan Gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik                                                                                                                                             | 100%      |
| 9  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK                                                                                                                         | 2 Laporan |
| 10 | Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                                                                     | Persentase permasalahan dalam spengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan                                                                                                                                          | 85%       |
| 11 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum (3363)                                                                         | Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat tepat dan akurat sesuai dengan SOP                                                                                                                     | 92%       |
|    |                                                                                                                                        | Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan                                                                                                                       | 95%       |
| 12 | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana (3364) | Persentase Masyarakat didaerah Potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan atau daerah dengan Partisipasi masyarakat terendah yang mendapatkan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” | 90%       |
| 13 | Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat                                                               | Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP                                                                                                                                         | 100%      |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2019.
3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2021 sebagai berikut:

*Tabel 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2021*

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                    | TARGET ANGGARAN (Rp) | OUTPUT                                                                                                  | TARGET    | OUTCOME                                                                                                                          | TARGET (%) | K E T |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1  | <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>                                                                                                          | <b>2.902.957.000</b> | <b>Presentase Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi yang tepat waktu dan sesuai aturan</b> |           | <b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>                                             |            |       |
|    | a. Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik                                              | 1.980.000            | Norma, Standard, prosedur dan kriteria                                                                  | 1 NSPK    | Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu                                                                               | 100%       |       |
|    |                                                                                                                                                                           | 6.900.000            | Layanan perencanaan dan penganggaran internal                                                           | 1 Layanan | Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu                                                                                      | 95%        |       |
|    |                                                                                                                                                                           | 2.040.000            | Layanan Monitoring dan evaluasi internal                                                                | 1 Laporan | Inventarisasi Logistik Pemilu                                                                                                    | 1 Laporan  |       |
|    | b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu | 2.240.000            | Pelayanan Publik Lainnya                                                                                | 1 Layanan | Layanan Adminitrasi Kepemiluan                                                                                                   | 92%        |       |
|    |                                                                                                                                                                           | 2.715.000            | Data dan Informasi Publik                                                                               | 1 Layanan | Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum                                                                                           | 95%        |       |
|    | c. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Parsipasi Masyarakat dan PAW         | 29.000.000           | Pelayanan Publik kepada masyarakat                                                                      | 1 Orang   | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana. | 90%        |       |
|    |                                                                                                                                                                           | 2.850.000.000        | Tahapan Pemilihan Kepala Daerah                                                                         | 1 Orang   | Tahapan Pemilihan Kepala Daerah                                                                                                  | 90%        |       |
|    |                                                                                                                                                                           | 2.000.000            | Pelayanan Publik Lainnya                                                                                | 1 Layanan | Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden                                                             | 90%        |       |
|    |                                                                                                                                                                           | 1.000.000            | Data dan Informasi Publik                                                                               | 1 Layanan | Publikasi Informasi                                                                                                              | 90%        |       |

|          |                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                            |           |                                                                                      |           |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|          |                                                                                                       | 5.082.000            | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal                                                                                                                                   | 1 Laporan | Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada                                       | 90%       |  |
|          | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                     | <b>2.694.170.000</b> | <b>Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).</b> |           | <b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b> |           |  |
| <b>2</b> | a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU               | 2.041.305.000        | Layanan Perkantoran                                                                                                                                                        | 1 Layanan | Layanan Perkantoran                                                                  | 100%      |  |
|          |                                                                                                       | 10.316.000           | Layanan Pengawasan Internal                                                                                                                                                | 1 Laporan | Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)                                | 95%       |  |
|          |                                                                                                       | 26.147.000           | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal                                                                                                                                   | 1 Laporan | Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu                               | 1 Laporan |  |
|          | b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data                                                         | 30.400.000           | Layanan Data dan Informasi                                                                                                                                                 | 1 Layanan | Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih                                                    | 100%      |  |
|          |                                                                                                       | 7.764.000            | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal                                                                                                                                   | 1 Laporan | Laporan Pelaksanaan Kegiatan                                                         | 1 Laporan |  |
|          |                                                                                                       | 2.681.000            | Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                                                               | 1 Layanan | Dokumen Perencanaan Anggaran                                                         | 75%       |  |
|          | c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana | 568.485.000          | Layanan Perkantoran                                                                                                                                                        | 1 Layanan | Layanan Perkantoran                                                                  | 100%      |  |
|          |                                                                                                       | 4.600.000            | Layanan Sarana Internal                                                                                                                                                    | 1 Unit    | Pengelolaan Barang Milik Negara                                                      | 90%       |  |
|          | d. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | 2.472.000            | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal                                                                                                                                   | 1 Laporan | Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                 | 85%       |  |

**B. Realisasi Anggaran**

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai penyebab tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan. Sebagai indikatornya dikelompokkan dalam 2 (dua) indikator, yaitu:

- **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

- **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

| NO | RENTANG CAPAIAN        | KATEGORI CAPAIAN |
|----|------------------------|------------------|
| 1  | Kurang dari 55%        | Gagal            |
| 2  | 55% sampai dengan 75%  | Cukup Baik       |
| 3  | 76% sampai dengan 90%  | Baik             |
| 4  | 91% sampai dengan 100% | Sangat Baik      |

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kegiatan Tahun 2020 dapat dianalisa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8.

*Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2021 dan Tabel 8. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2020 realisasi, sebagai berikut:*

*Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2021*

| PROGRAM                                                          | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                           | INDIKATOR KEGIATAN                                                                                                                                   | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%) | KET |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|-----|
| <b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> | a. Kegiatan fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik                                              | Persentase Pengiriman Logistik Pemilu/Pemilihan tepat Jenis, jumlah dan waktu                                                                        | 1.980.000   | 1.964.500      | 99,22%                           |     |
|                                                                  |                                                                                                                                                                           | Persentase Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik                                      | 6.900.000   | 6.890.500      | 99,86%                           |     |
|                                                                  |                                                                                                                                                                           | Persentase inventarisasi dan Pemeliharaan Logistik Pemilu/Pemilihan                                                                                  | 2.040.000   | 2.039.000      | 99,95%                           |     |
|                                                                  | b. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu | Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik. | 2.240.000   | 2.240.000      | 100,00%                          |     |
|                                                                  |                                                                                                                                                                           | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP                                                    | 2.715.000   | 2.711.000      | 99,85%                           |     |

|                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |               |               |         |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--|
|                                   | c. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Parsipasi Masyarakat dan PAW | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana | 29.000.000    | 28.998.900    | 100,00% |  |
|                                   |                                                                                                                                                                  | Tahapan Pemilihan Kepala Daerah                                                                                                | 2.850.000.000 | 2.829.512.727 | 99,28%  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                  | Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti                                                                          | 2.000.000     | 1.980.000     | 99,00%  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                  | Persentase informasi dan publikasi                                                                                             | 1.000.000     | 989.000       | 98,90%  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                  | Persentase menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal                             | 5.082.000     | 5.081.400     | 99,99%  |  |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b> | a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU                                                                          | Persentase menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu.                                                    | 2.041.305.000 | 2.007.498.308 | 98,34%  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                  | Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid             | 10.316.000    | 10.307.550    | 99,92%  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                         | 26.147.000    | 26.049.500    | 99,63%  |  |
|                                   | b. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data                                                                                                                    | Dokumentasi Pemutakhiran data Pemilih                                                                                          | 30.400.000    | 30.314.497    | 99,72%  |  |

|                                                                                                       |                                                                                                          |                      |                      |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
|                                                                                                       | Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                                | 7.764.000            | 7.755.698            | 99,89%        |  |
|                                                                                                       | Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan                               | 2.681.000            | 2.590.000            | 96,61%        |  |
| c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana | Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik              | 568.485.000          | 568.128.365          | 99,94%        |  |
|                                                                                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK             | 4.600.000            | 4.592.900            | 99,85%        |  |
| d. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Persentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran. | 2.472.000            | 2.422.700            | 98,01%        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |                                                                                                          | <b>5.597.127.000</b> | <b>5.542.066.545</b> | <b>99,02%</b> |  |

*Tabel 8. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2020*

| PROGRAM                                                                                            | URAIAN KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR KEGIATAN                                        | TARGET (Rp)   | REALISASI (Rp) | PROSENTASE<br>PENCAPAIAN<br>TARGET<br>(%) | KET |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|-----|
| <b>Program<br/>Dukungan<br/>Manajemen<br/>dan<br/>Pelaksanaan<br/>Tugas Teknis<br/>Lainnya KPU</b> | a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon   | Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.          | 23,378,000    | 22,641,800     | 96.85                                     |     |
|                                                                                                    |                                                                                                             | Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)     | 8,888,000     | 2,950,000      | 33.19                                     |     |
|                                                                                                    |                                                                                                             | Terlaksananya layanan perkantoran                         | 1,887,810,000 | 1,873,704,099  | 99.25                                     |     |
|                                                                                                    | b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu.              | 9,528,000     | 3,000,000      | 31.49                                     |     |
|                                                                                                    | c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data                                                               | Dokumen perencanaan anggaran                              | 11,938,000    | -              | 0.00                                      |     |
|                                                                                                    |                                                                                                             | Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja | 1,752,000     | -              | 0.00                                      |     |
|                                                                                                    | d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran                                                  | Pengelolaan barang milik negara                           | 4,600,000     | 4,270,000      | 92.83                                     |     |
|                                                                                                    |                                                                                                             | Layanan Perkantoran                                       | 534,199,000   | 437,523,994    | 81.90                                     |     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                 |                |                |                |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                                                                      | e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota                                                                    | Laporan hasil Evaluasi LAKIP                                    | 743,000        | -              | 0.00           |       |
| Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW | Sosialisasi Pilkada Serentak 2020                               | 1,500,000      | -              | 0.00           |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                  | Pengelolaan PAW anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota | 200,000        | -              | 0.00           |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                  | Publikasi dan Informasi                                         | 800,000        | -              | 0.00           |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                  | Tahapan pemilihan                                               | 16,266,403,000 | 14,446,429,166 | 88.81          |       |
|                                                                      |                                                                                                                                                                  | TOTAL                                                           |                | 18,751,739,000 | 16,790,519,059 | 89.54 |

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8. Di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2021** dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 5.597.127.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp5.542.066.545,-** dengan prosentase **99.02%**, sedangkan di tahun **Tahun Anggaran 2020** dengan 6 (Enam) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp.18.751.739.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 16.790.519.059,-** dengan prosentase **89.54%**, Tahun Anggaran 2021 Realisasi Anggarannya lebih tinggi dari tahun anggaran 2020. Terdapat 19 indikator kegiatan yang capaiannya > 96 % yang berkategori Sangat Baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum, dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun Masalah KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2021 yaitu:

- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur Sekretariat KPU Kota Tomohon; Perlunya SOP dalam setiap Pelaksanaan Kegiatan serta perlunya peningkatan kualitas sarana.



Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Tomohon diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberikan Informasi kepada Pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan serta kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan di masa yang akan datang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
KETUA**

**HARRYANTO Y. S. LASUT**